

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab akhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan serta implikasi dan rekomendasi berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya.

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan mengenai kesiapsiagaan masyarakat di Desa Ciater dalam menghadapi bencana letusan gunungapi di sekitar TWA Gunung Tangkuban Parahu secara keseluruhan berada dalam kategori “Kurang Siap” dengan nilai indeks kesiapsiagaan sebesar 54,27 (dari nilai maksimal 100). Nilai indeks dari setiap indikator kesiapsiagaan masyarakat di setiap wilayah kajian yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat Kampung Cicenang dalam mitigasi bencana di TWA Gunung Tangkuban Parahu dan sekitarnya berada dalam kategori “Sedang”. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui lokasi titik kumpul dan juga memiliki pengetahuan yang minim mengenai bencana gunungapi.
2. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat Kampung Dawuan dalam mitigasi bencana di TWA Gunung Tangkuban Parahu dan sekitarnya berada dalam kategori “Sedang”. Hal ini dikarenakan keseluruhan responden belum pernah berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan pelatihan dalam menghadapi bencana letusan gunungapi. Dan juga masih kurangnya masyarakat Kampung Dawuan dalam mempersiapkan rencana tanggap darurat.
3. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat Kampung Ciater dalam mitigasi bencana di TWA Gunung Tangkuban Parahu dan sekitarnya berada dalam kategori “Tinggi”. Hal tersebut didukung dengan terdapatnya penyuluhan mengenai mitigasi bencana gunungapi yang diadakan di Kantor Desa. Dan juga ada nya penyampaian materi mengenai mitigasi bencana gunungapi yang diberikan dari pemerintah daerah setempat melalui TAGANA.
4. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat Kampung Terbang dalam mitigasi bencana di TWA Gunung Tangkuban Parahu dan sekitarnya berada dalam kategori

“Tinggi”. Masyarakat Kampung Terbang memiliki sikap yang selalu waspada dalam mengantisipasi kejadian alam bencana Gunungapi dan juga dibarengi dengan pemahaman masyarakat mengenai mitigasi bencana gunungapi.

5. Terdapat beberapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya menghadapi bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mitigasi bencana di TWA Gunung Tangkuban Parahu, yakni BPBD, PVMBG, pemerintah daerah, dan pengelola wisata (TWA Gunung Tangkuban Parahu dan Cikole Jaya Giri Resort). BPBD berkontribusi dalam pelaksana program mitigasi bencana dengan mengadakan simmulasi dan penyuluhan, PVMBG menjalankan fungsinya dalam melakukan pemantauan mengenai aktivitas gunung api dan membuat laporan untuk nantinya diberikan kepada instansi-instansi terkait lainnya, pemerintah daerah membantu pemangku kepentingan lainnya untuk berkoordinasi dan memberikan akses informasi mengenai mitigasi bencana kepada masyarakat melalui TAGANA, serta pengelola wisata dalam hal ini bekerjasama dengan PVMBG dan BPBD dalam upaya membangun fasilitas mitigasi bencana di TWA Gunung Tangkuban Parahu dan sekitarnya. Namun dalam hal ini pengelola wisata belum berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana gunungapi. Untuk pengelolaan Cikole Jaya Giri Resort sendiri sebagai pihak dalam memfasilitasi wisatawan dalam hal akomodasi telah mendapatkan penyampaian materi oleh BPBD dan juga mendapatkan informasi status kebencanaan yang bersumber dari PVMBG.
6. Dengan masih adanya kondisi masyarakat di Desa Ciater yang masih harus ditingkatkan kesiapsiagaannya sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, atau sesudah terjadinya bencana, maka upaya yang harus dilakukan masyarakat, pemerintah dan pengelola dalam menghadapi bencana yakni adanya pemantapan koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan melalui harmonisasi dan sinkronasi kebijakan, meningkatkan kemampuan masyarakat yang terlatih untuk melakukan penanganan secara mandiri dengan diadakannya penyuluhan secara reguler, penyebarluasan informasi kebencanaan yang andal dengan memanfaatkan telepon seluler maupun social media, dan juga penyampaian informasi mengenai bencana secara merata oleh organisasi

khusus yang menangani bencana letusan gunungapi. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak dari resiko terjadinya bencana dan dapat menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin.

## 5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis mengajukan beberapa implikasi dan rekomendasi dalam menyelesaikan masalah mengenai kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman risiko bencana gunungapi diantaranya:

1. Kepemimpinan Sapalibatisme dibutuhkan dalam proses ini, yaitu dengan memberikan peran kepada semua pemangku kepentingan dengan tidak mengambil alih tugas dan fungsi mereka. Semua pelaku penanggulangan bencana diajak bicara atau didengarkan kebutuhannya dan dibantu, dimana pelaksanaan penanggulangan bencana melibatkan semua pelaku secara aktif (Maarif, 2011).
2. Dalam penanggulangan bencana, kepemimpinan Vertizontal merupakan bentuk kepemimpinan yang tepat untuk digunakan. Konsep vertizontal ini sudah sesuai dengan arahan Presiden dalam mekanisme penanggulangan bencana. Pendekatan vertizontal adalah pendekatan vertikal berjenjang dan horizontal dalam bentuk fungsi koordinasi. Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan *committed parties* atau pihak yang bertanggung jawab secara langsung saat bencana, sedangkan Pemerintah Pusat dalam hal ini memberikan penguatan (*reinforcement*) dan sebagai katalis untuk mempercepat proses penanganan bencana, BNPB (2014).
3. *Stakeholder* khususnya individu/ masyarakat yang menjadi subyek dan objek dari penelitian ini diharapkan dapat berperan aktif dalam segala kegiatan peningkatan kemampuan mitigasi bencana yang diadakan Pemerintah, LSM maupun dari Perusahaan. Apabila masyarakat berperan aktif dalam kegiatan simulasi, seminar/workshop mengenai bencana letusan gunungapi, masyarakat diharapkan dapat menambah pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk tanggap mengambil tindakan secara mandiri apabila terjadi bencana.

4. Untuk Pemerintah setempat hendaknya mengadakan program seperti seminar dan juga penyuluhan mengenai mitigasi bencana gunung api secara rutin, minimal dilakukan setahun sekali. Karena masih banyak dari kalangan masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara penanganan letusan gunungapi sebelum, saat dan setelah terjadi bencana. Langkah selanjutnya adanya koordinasi antara Pemerintah, pengelola kawasan wisata TWA Gunung Tangkuban Parahu dan juga Tagana dalam melakukan peringatan dini bencana.
5. Mengenai Kampung-Kampung yang dekat dengan sumber erupsi seperti Kampung Cicenang dan Dawuan diharapkan Pemerintah atau Lembaga dapat diintegrasikan lebih jauh lagi diadakannya pemberian materi/ program mengenai mitigasi bencana. Dari hasil penelitian menunjuka kampung-kampung tersebut masih belum siap dalam menghadapi bencana, padahal yang terdekat dengan sumber erupsi daripada kampung-kampung di Desa Ciater lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka meminimalisir dampak yang ditanggung masyarakat apabila terjadi bencan.
6. Bagi Pembelajaran di Studi Pariwisata, sudah seharusnya dalam pembangunan pariwisata ini tidak hanya selalu difokuskan terhadap wisatawan saja, namun masyarakat yang tinggal disekitar kawasan wisata juga harus diperhatikan. Sudah seharusnya sebagai insan pariwisata dapat meminimalisir kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat bencana dari segala subyek dan aspek. Sebab masyarakat juga salah satu aspek yang penting dalam pembangunan pariwisata.
7. Untuk penelitian selanjutnya diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai hubungan atau keterlibatan antara wisatawan dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana.